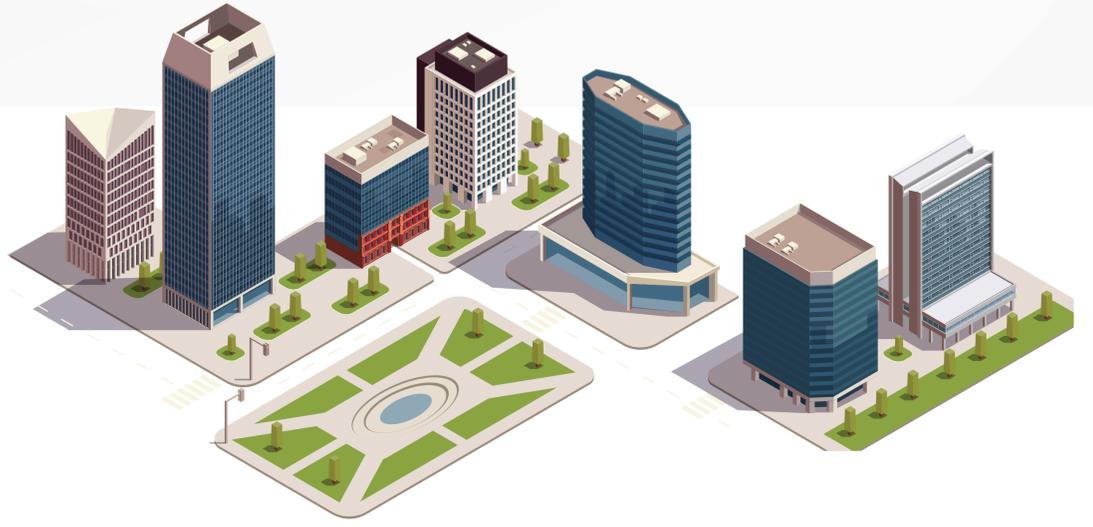


STABILITAS SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA DI TENGAH MENINGKATNYA RISIKO GEOPOLITIK

“Stabilitas sektor jasa keuangan terjaga stabil di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan melemahnya aktivitas perekonomian global”



PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

Global

- Perlambatan pertumbuhan di beberapa negara utama dan ketidakpastian geopolitik menjadi tantangan utama bagi ekonomi global saat ini. Perekonomian AS menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari ekspektasi awal seiring solidnya pasar tenaga kerja serta membaiknya permintaan domestik. Di Eropa, aktivitas perekonomian mulai membaik yang terlihat dari naiknya penjualan ritel, namun dari sisi manufaktur masih relatif tertekan.
- Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada Q3-2024 masih menunjukkan perlambatan baik dari sisi *demand* maupun *supply*. Hal ini mendorong pemerintah dan bank sentral Tiongkok terus mengeluarkan stimulus untuk mendorong sektor riil dan kembali melonggarkan kebijakan moneter.

- Risiko geopolitik global yang meningkat turut menjadi tantangan bagi prospek perekonomian ke depan, terutama terkait eskalasi konflik di Timur Tengah, serta dinamika politik di AS menjelang Pemilihan Presiden di November 2024. Instabilitas yang terjadi di Timur Tengah menyebabkan harga komoditas *safe haven* seperti emas meningkat.
- Perkembangan tersebut menyebabkan premi risiko meningkat dan kenaikan yield secara global. Hal ini mendorong aliran modal keluar (*outflow*) dari negara *emerging markets*, termasuk Indonesia, sehingga pasar keuangan *emerging markets* mayoritas melemah.

Domestik

- Kinerja perekonomian secara umum masih terjaga stabil di tengah lemahnya kondisi perekonomian global.
- Inflasi inti terjaga serta neraca perdagangan masih mencatatkan surplus sejak Juli 2024.
- *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur perlu dicermati dimana masih berada di zona kontraksi.
- Pemulihan daya beli berlangsung relatif lambat.

PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON (PMDK)



IHSG
7.606,60
29 Okt'24 **4,59% ytd**

Jumlah Investor
14,32 Juta
29 Okt'24

Nilai Penghimpunan Dana
Rp
159,19 T
29 Okt'24

NAB Reksa Dana
Rp
504,06 T
29 Okt'24

Emiten Baru
30
29 Okt'24

Securities Crowdfunding

25 Oktober 2024

17
penyelenggara
berizin OJK

Rp 1,26 Triliun
total dana yang
dihimpun

650
penerbit

166.515
pemodal



Perdagangan Karbon

26 September 2023 s.d 29 Oktober 2024

Rp37,09 miliar
Akumulasi Nilai Perdagangan

614.454 tCO2e
Volume Unit

90 pengguna jasa
yang mendapatkan izin



PERBANKAN (PBKN)

Kredit

Agu'24 **Rp7.508 T**

Sep'23 **Rp6.837 T**

Sep'24 **Rp7.579 T**

10,85% yoy

Dana Pihak Ketiga

Agu'24 **Rp8.650 T**

Sep'23 **Rp8.147 T**

Sep'24 **Rp8.721 T**

7,04% yoy

Kredit Investasi

12,26%
yoy

Sep'24

Kredit Modal Kerja

10,01%
yoy

Sep'24

Kredit Konsumsi

10,88%
yoy

Sep'24

CAR
26,85%

Sep'24

AL/NCD
112,66%

Sep'24

AL/DPK
25,40%

Sep'24

LaR
10,11%

Sep'24

NIM
4,60%

Sep'24

NPL Gross
2,21%

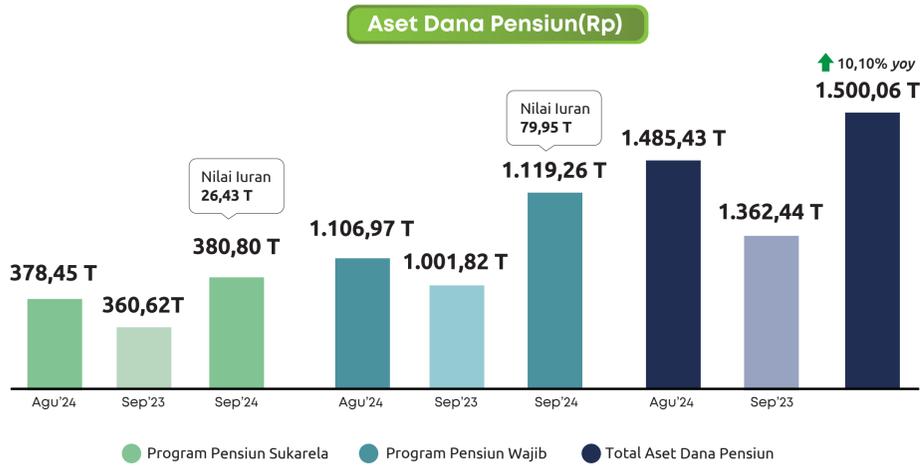
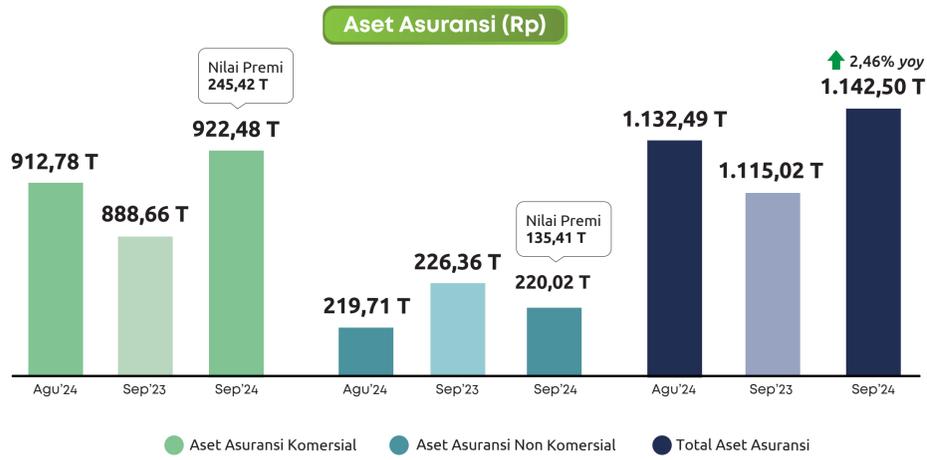
Sep'24

RoA
2,73%

Sep'24



PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN (PPDP)



Aset Perusahaan Penjaminan



LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML)

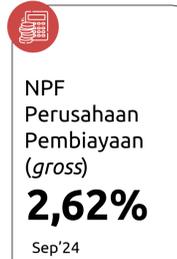
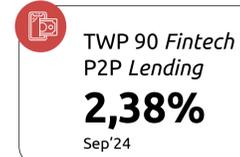
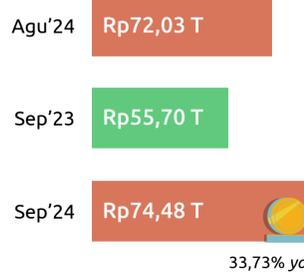
Piutang Pembiayaan



Pembiayaan Modal Ventura



Outstanding Pembiayaan Fintech P2P Lending



INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO (IAKD)

Regulatory Sandbox

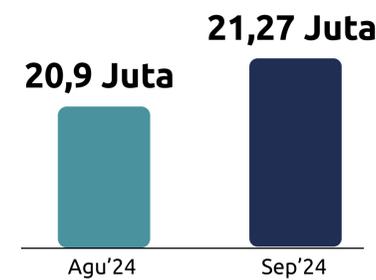


Penyelenggara ITSK

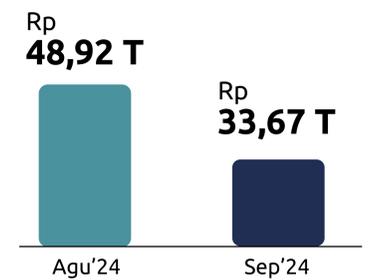


Aset Kripto

Jumlah Investor



Transaksi Kripto



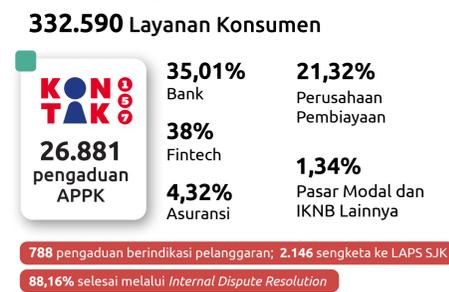
PERKEMBANGAN PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

Program literasi dan edukasi keuangan



(ytd 28 Oktober 2024)

Program Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal



Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal



Penegakan Hukum Ketentuan Pelindungan Konsumen berupa Sanksi Administratif, Sanksi Peringatan Tertulis, Sanksi Denda, dan Surat Perintah serta penggantian kerugian konsumen oleh PUJK.



Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang relatif stagnan, ketegangan geopolitik yang terus berlanjut di Kawasan Timur Tengah, dan perlambatan ekonomi Tiongkok, OJK terus mencermati perkembangan terkini dan dampaknya terhadap sektor jasa keuangan domestik, serta melakukan *forward looking assessment* atas kinerja sektor jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan diminta agar terus mewaspadai potensi risiko ke depan dan melakukan langkah mitigasi risiko yang diperlukan.



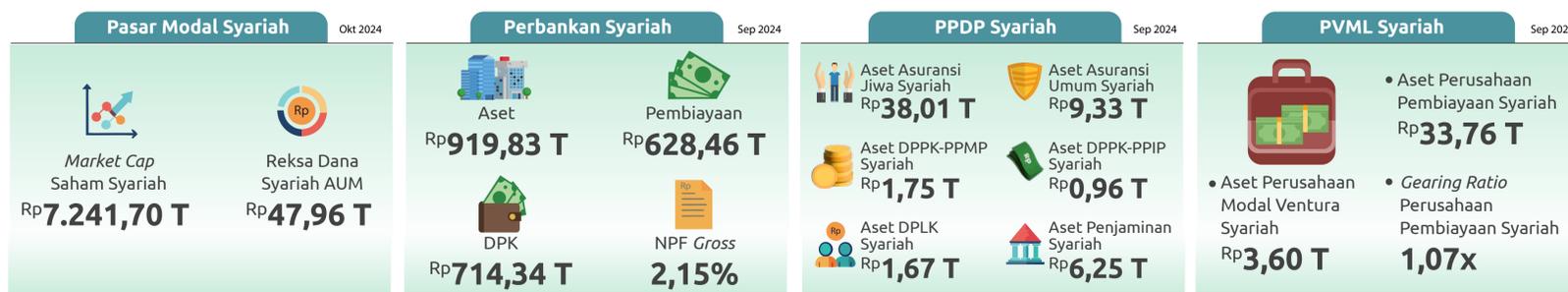
Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (SJK) serta Infrastruktur Pasar

- Meminta perbankan dan pelaku industri PVML untuk memperluas akses pembiayaan UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola dan manajemen risiko.
- Meluncurkan *Roadmap* Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan BPD yang *resilient*, kontributif, dan kompetitif.
- Bergabung dalam Global Asia Insurance Partnership (GAIP) sebagai wujud komitmen untuk terus memperkuat ekosistem industri perasuransian di Asia dengan memperluas kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global.
- Menerbitkan beberapa ketentuan:
 - POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank yang ditujukan untuk menekankan pentingnya perilaku berintegritas dari segenap *stakeholders* bank mencakup pegawai, pengurus, dan pemegang saham pengendali (PSP) dalam penyusunan laporan keuangan.
 - POJK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI yang akan memperkuat landasan hukum serta kerangka pengaturan dan pengawasan bagi OJK.
 - POJK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (POJK Satuan Tugas).
 - SEOJK Nomor 11/SEOJK.01/2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terkait penambahan Pelapor Wajib SLIK yakni Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan *fintech p2p lending*.
 - SEOJK Nomor 9/SEOJK.05/2024 tentang Penilaian Kualitas atas Tagihan Subrogasi, Kegiatan Penjaminan, dan *Suretyship* (SEOJK Subrogasi).
 - SEOJK Nomor 10/SEOJK.05/2024 tentang Mekanisme dan Tata cara Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (SEOJK *Spin-Off*).
 - SEOJK Nomor 13/SEOJK.08/2024 tentang Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (SEOJK LRR LIK).
 - SEOJK Nomor 14/SEOJK.05/2024 tentang Persetujuan dan Pelaporan Produk Asuransi.
- Dalam proses penyusunan beberapa rancangan ketentuan atau standar:
 - RPOJK Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku Di Sektor Jasa Keuangan (RPOJK SIPELAKU) yang mengatur mengenai pemanfaatan dan tata kelola SIPELAKU yang memuat data dan informasi rekam jejak pelaku *fraud* di SJK.
 - RPOJK Perintah Tertulis yang merupakan amandemen ketentuan terkait perintah tertulis sehubungan dengan terbitnya UU P2SK.
 - RPOJK Kegiatan Usaha Perbankan, yang berlaku bagi bank umum maupun BPR/S.
 - RPOJK Pengembangan dan Penguatan Transaksi dan Lembaga Efek, sebagai turunan UU P2SK.
 - RPOJK Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
 - Beberapa peraturan di bidang Pengelolaan Investasi, seperti RPOJK Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi, RPOJK Penerapan Manajemen Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi dan RPOJK Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi.
 - RPOJK Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).
 - RPOJK Pengawasan, Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan PVML.
 - RPOJK Tata Kelola yang Baik bagi PVML.
 - RPOJK Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA).
 - RPOJK Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).
 - RPOJK Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
 - RSEOJK Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
 - RSEOJK Laporan Penilaian Sendiri.
 - Bersama Tim Penyusun dan Tim Verifikator lainnya yang terdiri dari Asosiasi SJK, Praktisi, Akademisi, dan perwakilan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) melakukan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PEPK) sejak awal tahun 2024.



Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

- Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) melanjutkan penguatan sebesar 8,71 persen *ytd*. Sementara itu, kinerja intermediasi SJK syariah masih tumbuh positif secara *yoy*, dengan pembiayaan perbankan syariah tumbuh 11,40 persen, kontribusi asuransi syariah tumbuh 13,17 persen, dan piutang pembiayaan syariah tumbuh 20,89 persen.



- Pada Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah Tahun 2024 di Banda Aceh, OJK mengarahkan fokus pengembangan perbankan syariah selama tahun 2024-2025 pada 5 area yaitu konsolidasi bank syariah, pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS), penyusunan pedoman produk dan pengembangan keunikan produk, penguatan peran perbankan syariah pada ekosistem ekonomi syariah, serta peningkatan peran bank syariah pada pengembangan UMKM.
- Dalam rangka mengembangkan produk perbankan syariah untuk menguatkan daya saing perbankan syariah nasional, OJK meluncurkan 3 pedoman produk perbankan syariah yaitu: a) Pedoman Produk Pembiayaan Mudharabah; b) Pedoman Implementasi *Shariah Restricted Investment Account* (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah; dan c) Pedoman Implementasi *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD).
- Sampai dengan 28 Oktober 2024, terdapat 41 perusahaan asuransi/reasuransi yang telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS). Progres dari RKPUS yang telah dilaksanakan adalah 1 unit syariah perusahaan asuransi jiwa telah memperoleh izin usaha asuransi jiwa syariah dan saat ini dalam proses pengalihan portofolio dari UUS kepada perusahaan asuransi jiwa syariah yang baru dan 1 unit syariah perusahaan asuransi umum telah melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah yang telah ada dan saat ini dalam proses pengembalian izin unit syariah.
- Dalam upaya memperkuat aliansi strategis dalam ekosistem keuangan syariah, OJK berkolaborasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyelenggarakan Ijtima' Sanawi (Pertemuan Tahunan) Dewan Pengawas Syariah (DPS) 2024 di Jakarta
- Dalam rangka meningkatkan peran LJK Syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, OJK menyelenggarakan kegiatan sinergi keuangan asuransi syariah bekerja sama dengan pelaku industri dan civitas akademika di Bandar Lampung
- OJK menyelenggarakan Syariah Financial Fair (SYAFIF) 2024 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 di Balikpapan, yang berkolaborasi dengan 13 Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah (PUJKS) dalam penyelenggaraan pameran produk dan layanan keuangan syariah
- Sebagai upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah pada ekosistem pesantren, OJK menyelenggarakan kegiatan Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) pada Oktober 2024 di Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah sebagai bagian dari BIK sekaligus memperingati Hari Santri 2024



Penguatan Tata Kelola OJK

- Terus meningkatkan budaya integritas dan *zero tolerance* terhadap *fraud* melalui pelaksanaan kegiatan integritas untuk pegawai OJK dan keluarga di wilayah Jawa Tengah dan DIY yang dilakukan di Yogyakarta.
- Terus meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola dan integritas sektor jasa keuangan (SJK) secara berkelanjutan, antara lain dengan:
 - Melalui forum *International Conference for Economics and Business* ke-8 di Surabaya, OJK terus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan mitigasi risiko *sustainability* di Indonesia.
 - Menegaskan komitmen untuk terus menegakkan integritas dan mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya profesi *anti fraud* untuk mencegah *fraud* di SJK dalam *International Conference on Financial Criminology* di Jakarta.
 - Pada IAI Visit OJK sebagai salah satu forum komunikasi OJK dengan asosiasi profesi SJK, OJK menegaskan pentingnya peran profesi akuntan dalam menjaga tata kelola SJK sebagai bagian dari *3 lines model*.
 - Penguatan program pengembangan ketentuan GRC melalui *benchmarking* dalam rangka kajian penguatan dan/atau pengkinian ketentuan terkait Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK
- OJK akan terus memperkuat governansi dan integritas, baik untuk pegawai, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan OJK dalam mendukung terwujudnya ekosistem sektor jasa keuangan yang berdaya saing dan berperan optimal dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK juga memberikan dukungan kepada para Anggota BPK yang baru dilantik, agar dapat terus bekerja sama dalam meningkatkan tata kelola baik di internal OJK maupun sektor jasa keuangan.



Penegakan Ketentuan di SJK dan Perkembangan Penyidikan

- Sampai dengan 30 Oktober 2024, Penyidik OJK telah menyelesaikan total 131 perkara yang terdiri dari 105 perkara PBKN, 5 perkara PMDK, 20 perkara PPDP dan 1 perkara PVML.
- Jumlah perkara yang telah diputus oleh pengadilan sebanyak 117 perkara, diantaranya 108 perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) dan 9 perkara masih dalam tahap kasasi.

Dengan kebijakan dan langkah penegakan ketentuan yang dilakukan, serta senantiasa bersinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha, OJK optimis sektor jasa keuangan dapat terjaga stabil dan tumbuh secara berkelanjutan.